BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas Keuangan Sekolah

1. Pengertian Akuntabilitas Keuangan Sekolah

kewajiban Akuntablilitas merupakan untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan indakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹

Menurut Sony dkk., akuntabilitas adalah pertangungjawaban public yang memiliki makna bahwasannya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.²

Menurut Nanang Fattah bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. ³

¹Edi Sukarsono, *Sistem pendidikan Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002),131.

²Sony Yuwono, dkk., *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)* (Malang: Bayu Media *Publishing*, 2005), 59.

³ Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, (Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2004).92.

Masih menurut Nanang Fattah, bahwa akuntabilitas adalah kemampuan dalam memberikan informasi, penjelasan, pertanggung jawaban kinerja kepada pihak-pihak yang bekepentingan (*stakeholder*). ⁴

Menurut Halim akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang.⁵

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas didalam menejemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparasi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan

-

⁴ Ibid, 109.

⁵Raeni, *Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas Smk*, (Semarang: Economic Education Analysis Journal 3 (1), 2014).

pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.⁶ Indikator transparansi sekolah sendiri ada 3, yaitu: keterbukaan kebijakan anggaran sekolah, keterbukaan laporan pertanggungjawaban, adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berwenang (pemerintah, sekolah, wali murid dan masyarakat) atas penggunaan dana/uang sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan dan laporan yang telah dibuat.

Sedangkan Pengelolan keuangan menurut Depdiknas bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.⁸

Menurut Lilik Huriyah, menejemen keuangan pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur menejemen dalam mengatur, memanfaaatkan

⁷ Sutedjo, Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansim Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal, (Semarang: Tesis, Program Pascasarjana, 2009)

_

⁶Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Penddikan Islam* (Surabaya: UINSA Pers, 2014) 8.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah.* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, 2002) 88.

dan mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pedidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan secara sitemastis dan strategis.⁹

Jadi, pengelolaan keuangan adalah segala aktifitas dalam mengatur keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan sekolah

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan sekolah adalah pertanggungjawaban terhadap pemasukkan, pengeluaran dan penggunaan uang sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Akuntabilitas

Dalam buku MBS di SMP pada era otonomi daerah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kenerja sekolah. ¹⁰

Sedangkan menurut Slamet PH., tujuan akuntabilitas pendidikan adalah kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber

.

⁹Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan*, 4.

¹⁰Direktorat Pembinaan SMP, *Manajemen Berbasis Sekolah di SMP pada Era Otonomi Daerah* (Jakarta:, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar, Kementrian Pendidikan Nasional, 2012) 197.

perubahan masyarakat. Slamet menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah mendorong terciptanna kepercayaan masyarakat terhapat sekolah.

3. Fungsi Akuntabilitas

Fungsi dari akuntabilitas adalah adanya peluang untuk melakukan diskusi atau komunikasi sebagai upaya menemukan kesepakatan tentang hal yang terbaik dalam bentuk aturan tertentu untuk dilaksanakan. Kesepakatan tersebut muncul dalam bentuk aturan tertentu untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencaan. 12

4. Manfaat Akuntabilitas

Manfaat dari akuntabilitas adalah:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat

¹¹ Slamet PH, *Kapita selekta desentralisasi pendidikan di indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI, 2005) 6.

_

¹²Nanang Fattah...Konsep Manajemen Berbasis Sekolah, 93.

- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif dan ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat
- e. Mendorong pembangunan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹³

Dalam buku Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah, manfaat akuntabilitas adalah sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip yang tidak memberi peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan baik terhadap perubahan terhadap program, metode kerja, maupun fasilitas. Akuntabilitas mampu menghadapi gerak terjadinya perubahan dan pengulangan, bahkan revisi perencanaan. Dengan kata lain akuntabilitas alat kontrol yang tidak memberi kesempatan untuk membuat perubahan. Sebagai alat kontrol akuntabilitas juga memberikan kepastian pada aspek-aspek perncanaan, antara lain:

- a. Tujuan atau performan yang ingin dicapai,
- b. Program atau tugas yang ingin dikerjakan untuk mencapai tujuan,
- c. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas,

¹³Waluyo, *Manajemen Public* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 197.

- d. Alat dan metode yang sudah jelas dana yang dipakai dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian yang sudah pasti,
- e. Lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan,
- Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti. 14

5. Asas-asas Akuntabilitas

Sedarmayanti mengatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
- b. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
- e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. 15

6. Pelaksana Akuntabilitas

Nanang Fattah menyebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas ditekankan kepada: 1) guru, 2) administrator, 3) kelompok minoritas 4) orang tua siswa 5)

¹⁴ Nanang Fattah, Konsep dan Manajemen Berbasis Sekolah, 97-98.

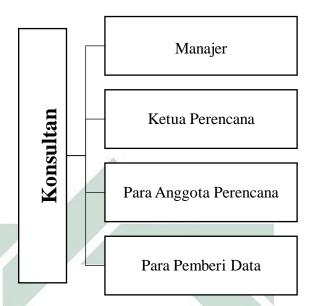
¹⁵Sudarmayanti, Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik" (Bandung: Mandar Maju, 2012), 70-71.

ahli psikometri 6) orang-orang luar lainnya. Sedangkan dalam perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:

- a. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Seperti dekan, rektor atau pimpinan unit kerja,
- Manajer / administrator / ketua lembaga sesuai dengan fungsinya sebagai manajer,
- c. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya dilapangan,
- d. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan,
- e. Para pemberi data harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang harus selalu siap dan akurat.¹⁶

_

¹⁶ Nanang Fattah, Konsep dan Manajemen Berbasis Sekolah, 94-95.



Bagan 2.1. Pelaksana Akuntabilitas

7. Langkah-langkah Akuntabilitas

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menentukan akuntablibilitas seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan sebagai berikut:

- a. Tentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut , misi atau tujuan perencanaan,
- b. Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik,
- c. Kondisi tempat bekerja ditentukan,
- d. Otoritas atau kewenangan setiap petugas pendidikan ditentukan,
- e. Pelaksana yang akan mengerjakan program / tugas ditentukan. Ia adalah penanggung jawab program menurut konsep akuntabilitas adalah orang yang di kontrak,

- f. Kriteria performan pelaksana yang di kontrak itu dibuat sejelas-jelas mungkin,
- g. Tentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program / tugas tersebut,
- h. Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan terakhir,
- i. Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan. 17

8. Faktor yang mempengaruhi dan upaya peningkatan akuntabilitas pendidikan

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuan akuntabilitas.

Menurut Slamet ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:

- a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik / stakeholders di awal setiap tahun ajaran.

¹⁷ Nanang Fattah, Konsep dan Manajemen Berbasis Sekolah, 96.

- d. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
- e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik / stakeholders diakhir tahun.
- f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesempatan komitmen baru.¹⁸

9. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap program/kebijakan baik secara proses atau hasilnya, disisi lain partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Indikator akuntabilitas meliputi:

- a. Sekolah melakukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan.
- b. Adanya pelaporan secara periodik
- Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS¹⁹

Slamet PH, Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia, 6.
 Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, Analisis Pengaruh Akuntabilitas.,79-87

10. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana kas untuk diinvestasikan kembali,
- b. Memelihara barang-barang (asset) milik sekolah,
- c. Menjaga peraturan-peraturan atau praktek penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.²⁰

Sedangkan menurut Lilik Huriyah ada beberapa tujuan dalam menejemen keuangan pendidikan, yakni antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pendidikan,
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi keuangan pendidikan,
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran pendidikan.²¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkanya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

11. Tugas Manajemen Keuangan

Tugas manajemen keuangan dibagi menjadi tiga fase, yaitu:²²

a. Financial Planning

-

²⁰Nanang Fattah, *Konsep dan Manajemen* ..,193.

²¹ Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan.*, 6.

²²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 48-49.

Financial planning atau perencanaan financial yang disebut budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis, tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

b. Implementasion

Implementasion involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

c. Evaluation

Evaluasi involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian anggaraan.

12. Komponen Manajemen Keuangan

Komponen utama manajemen keuangan meliputi: prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, prosedur pemeriksaan.²³

13. Kerangka Menejemen Keuangan Sekolah

a. Dasar pengelolaan dana mencakup enam pengertian, yaitu: pembukuan yang cermat dan akurat, pertanggungjawaban yang luwes, pertukaran pengeluaran, kemudahan membelanjakan uang, kebijakan keuangan alokasi dana yang tepat.

²³Ibid. 49.

b. Penerimaan Dana Sekolah

Dalam kaitan dengan buku catatan penerimaan dana sekolah, kepala sekolah perlu memahami tentang:

- a) Tujuan diadakan buku catatan penerimaan dana sekolah,
- b) Informasi yang harus tercantum dalam setiap penerimaan, dan memberdayakan uang tunai. 24

14. Pembukuan Keuangan Sekolah

a. Buku Pos (Vate Book)

Buku pos pada hakikatnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencacat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang secara harian. Dari buku pos kepala sekolah dengan mudah dapat melihat apakah sekolah telah berlebih membelanjakan uang. Karena itu kepala sekolah dianjurkan untuk menyelenggarakan buku pos tersebut.

b. Faktur (Vouchers)

Faktur dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi tentang: maksud pembelian, tanggal pembelian, jenis pembelian, rincian barang yang dibeli, jumlah pembayaran, dan tanda tangan pemberi kuasa (kepala sekolah).

.

²⁴Ibid, 194.

c. Buku Kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta uang sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama, misalnya pembelian kapur tulis. Dengan demikian kepala sekolah akan segera tahu tentang keluar masuknya uang pada hari yang sama. Termasuk yang harus dicatat pada buku kas adalah cheque yang diterima dan dikeluarkan pada hari itu.

d. Lembar Cek

Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dilakukan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi, misalnya barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catata transaksinya benar. Orang yang berhak menandatangani lembar cek adalah kepala sekolah atau petugas keuangan (bursar).

e. Jurnal

Sebagai pengawas keuangan kepala sekolah harus membuka buku jurnal dimana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat.

f. Buku Besar (Financial ledgers)

Agar data keuangan berarti, informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan.Buku besar mencacat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya.

g. Buku Pembayaran Uang Sekolah

Buku ini berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Pencatatan untuk tiap pembayaran harus segera dilakukan untuk menghindari timbulnya masalah karena kuitansi hilang, lupa menyimpan atau karena pekerjaan yang menjadi bertumpuk.

h. Buku Kas Piutang(Black Book)

Buku piutang berisi daftar atau catatan orang yang berutang, kepada sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa hutang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus selalu dalam keadaan mutakhir untuk melihat jumlah uang milik sekolah yang belum kembali.

i. Neraca Percobaan

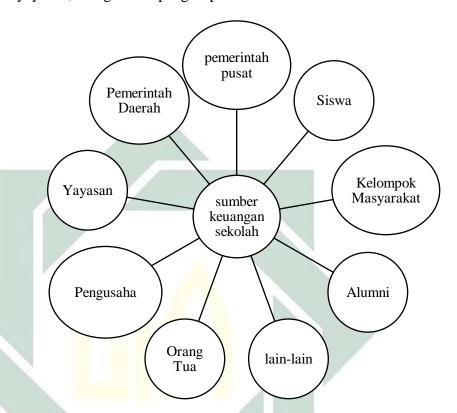
Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat, misalnya mingguan atau dua mingguan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah sewaktu-waktu (selama tahun anggaran) menentukan hal yang harus dilakukan dan menangguhkan pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu.²⁵

15. Sumber Dana Keuangan Sekolah

Sumber utama keuangan sekolah adalah: pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sekolah juga dapat mencari dana atau bantuan melalui berbagai cara

²⁵Nanang Fattah, Konsep dan Manajemen..,198.

selain melalui iuran BP3, misalnya melalui penyewaan fasilitas, pembayaran siswa, bantuan yayasan, dan gerakan pengumpulan dana.²⁶



2.2. Sumber Dana Keuangan Sekolah menurut Nanang Fattah

a. Orang Tua

Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh Negara-negara berkembang. Namun demikian, di Negara yang pemerintahannya mampu pun terkadang orang tua masih ingin menyumbang, misalnya alat transportasi, computer,

²⁶ Ibid. 186.

dan biaya untuk kunjungan belajar (study tour) karena mereka mengendaki anak mereka memperoleh pendidikan yang tebaik.

b. Pemerintah Pusat

Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya: memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan dan peralatan, membiayai proyek pembanguan dan rehabilitas sekolah untuk daerah tertentu.

Pemerintah juga memberikan sumbangan tak langsung melalui: pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas, pelatihan tenaga kependidikan lainnya (pustakawan, petugas lab.) penyiapan silabus, pelatihan pengunaan sarana dan prasarana, pemberian kesempatan pada guru untuk melanjutkan pendidikan.

c. Pemerintah daerah

Banyak Negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyedikan sarana fisik, fasilitas ruang kelas dan perlengkapan kantor. Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak.

d. Masyarakat

Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk

bertugas tertentu, seperti membangun pelaksanaan proyek sekolah, memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah, pengumpulan dana untuk sekolah tertentu didaerahnya, pengumpulan dana untuk usaha swasembada dengan melibatkan alumni sekolah.

e. Fasilitas Sekolah

Apabila pemerintah mengijinkan, dengan manajemen yang baik, fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, missal dengan jalan: menyewakan aula, menyewakan tempat bermain (lapangan olah raga), membuka usaha petanian bagi yang memiliki lahan kebun dan kolam, mendirikan kantin dan koperasi sekolah, membuka jasa foto copy, membuka jasa wartel.

f. Siswa

Siswa dapat menjadi sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. Cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan siswa antara:

- a) Usaha perkebunan, peternakan (unggas, sapi, kambing, lebah), kerajinan,
- b) Kegiatan pengumpulan dana seperti: pagelaran seni, tari-tarian, drama, pertandingan, pameran, penjual obral/bazaar, dan pencarian donator untuk amal.

g. Pemilik sekolah (Yayasan)

Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha social yang bukan pemerintah.Pembangunandan pembukaan sekolah

tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Badan atau yayasan seperti ini memberikan bantuan pada sekolah dengan berbagai cara, misalnya melalui penyediaan tanah dan bangunan, peralatan tanah serta tenaga. Mereka dapat membentuk dana abadi atau menanamkan uangnya dalam berbagai saham. Bunganya yang diperoleh dari penanaman modal tersebut dipakai untuk membantu sekolah.²⁷

Dalam buku Administrasi Dan Organisasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, tertera bahwa pembangunan bangsa harus dibiayai terutama dari dana dalam Negeri serta ketentuan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Negara, masyarakat, dan orang tua, maka secara garis besar biaya pendidikan bersumber dari empat arah, yaitu:

- a) Dari pemerintah meliputi kurang lebih 70%
 - Pemerintah pusat yang memikul sebagian besar pengeluaran untuk pelaksanaan pendidikan sehari-hari, baik personal maupun non personal,
 - Pemerintah Daerah Provinsi yang asalnya juga dari Pemerintah Pusat sebagai susidi dan dari pajak pendapatan di daerahnya.
 - 3) Pemerintah tingkat II, yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai uang subsidi serta dana lain yang merupakan kekayaan daerah.

²⁷ Nanang Fattah, Konsep dan Manajemen Berbasis Sekolah, 186-190.

- b) Dari orang tua murid meliputi kurang lebih 10-24% berupa uang SPP dan uang bantuan yang di kumpulkan melalui BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).
- c) Dari masyarakat meliputi kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lemabaga swasta, misalnya bantuan berupa alat-alat sekolah serta pabriknya, atau toko-toko perabot yang memberikan sumbangan sukarela melalui Departemen.
- d) Dari bantuan atau pinjaman luar negeri meliputi kurang lebih 1% saja dari seluruh anggaran pendidikan, misalnya dari IIEP (International Institution For Education Planning), UNESCO, UNICEF, World Bank, USAID (United States Agency for International Development) Ford Foundation, British Council dan sebagainya.²⁸

16. Administrasi Keuangan

Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan) dan *auditing* (pemeriksaan).

a. Budgeting (penyusunan anggaran)

Istilah anggaran sering kali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana.

Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBS (Rencana

_

²⁸Suharsimi Arikunto, *Organisai dan Administrasi Pendidikan*, 95-96.

Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah). Dalam dua istilah tersebut "anggaran" bukanlah suatu "rencana". Istilah rencana telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah "anggaran" sebagai suatu rencana.

b. Accounting (pembukuan)

Kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan meliputi dua hal yaitu menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan pengurusan ketata usahaan. Pengurus kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.

c. Auditing (pemeriksaan)

Yang dimaksud dengan auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada dalam departemen, mempertanggungjawaban pengurusan keuangan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing.

Auditing ini sangat penting dan bermanfaat sekurang-kurangnya bagi empat pihak, yaitu:

- a) Bagi bendaharawan yang bersangkutan
 - 1) Bekerja dengan arah yag pasti,
 - 2) Bekerja dengan target yang sudah ditentukan,

- 3) Tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai,
- 4) Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya,
- 5) Ada control bagi dirinya terhadap godaan penyalah gunaan uang.
- b) Bagi lembaga yang bersangkutan
 - 1) Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka,
 - 2) Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas,
 - 3) Tidak menimbulkan rasa curiga-mencurigai,
 - 4) Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima.
- c) Bagi atasannya
 - 1) Dapat diketahui bagian/keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan,
 - 2) Dapat diketahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya,
 - 3) Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran,
 - 4) Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan,
 - 5) Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahun yang lampau sebagai umpan balik bagi perencaan masa yang akan datang,
 - 6) Untuk arsip dari tahun ketahun.
- d) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

- Ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap uang milik Negara,
- 2) Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.²⁹

B. Partisipasi Mali Murid

1. Pengertian Partisipasi Wali Murid

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta di suatu kegiatan. ³⁰

Teori partisipasi merupakan salah satu jenis teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Partisipasi juga bisa dihubungkan dengan sebuah kondisi yang saling menguntungkan dari dua pihak atau lebih yang berinteraksi. Dimana semakin banyak manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut maka pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi akan semakin kuat hubungannya.

Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat.³¹

²⁹Suharsismi Arikunto, Organisasi Pendidikan, 90-91.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1072.

³¹Muslikh Bahaddur, Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Pembelajaran Di Sd Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta (Yogyakarta: UNY, 2012), 14.

Jadi, partisipasi adalah keterlibatan, keikutsertaan, serta kepedulian seseorang dalam suatu kegiatan dimana tindakan tersebut disertai dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Sedangkan secara biologis, orang tua adalah orang yang telah melahirkan seorang anak sehingga dapat menjalankan kehidupannya di dunia. Orang tua menurut Kunaryo Hadikusumo, sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (ibunya) dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua (terutama ibu) bayi (anak manusia) itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa.³²

Sedangkan wali sendiri dalam pengertian secara harfiah bermakna seseorang yang menjadi panutan, seseorang yang dapat dipercaya atau pelindung.³³ Dalam hal ini, wali siswa yaitu seorang yang menggantikan orang tua dalam membimbing dan mengikuti tumbuh kembang siswa.

Wali siswa berperan sama pentingnya terhadap proses belajar siswa, karena juga merupakan pengganti orang tua dalam mendidik siswa dirumah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan orang yang telah melahirkan (ibu) seorang anak dengan secara

³²Kunaryo Hadikusumo. Pengertian Orang Tua. 1996. Artikel. http://aryesnovianto. blogspot.com/2010/12/ pengertian-orang-tua-menurut-kunaryo.html. diakses pada sabtu 10 November 2016

³³http//www.wikipedia.org.com.

langsung memberikan pendidikan yang pertama kepada anak di lingkungan keluarga.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Sedangkan wali merupakan seseorang yang menggantikan peran orang tua dirumah dalam mendidik siswa dirumah. Sehingga peran wali siswa sama dengan orang tua.

Jadi partisipasi wali murid adalah kesadaran dan kepedulian orangtua / wali murid dalam melakukan aktivitas-aktivitas turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan di sekolah secara proporsional dilandasi kesepakatan.

2. Macam-Macam Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:³⁴

a. Partisipsi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

_

³⁴Muslikh Bahaddur, Partisipasi Orang Tua, 13-14.

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Pendapat lain disampaikan oleh Subandiyah yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain,
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan.³⁵

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan macam partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan.(participation in decision making).
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing).
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits).

3. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang

3

³⁵ Ibid, 15.

lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. 36

Menurut Kokon Subrata bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- c. Turut serta memberikan sumbangan material.
- d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).³⁷

Lebih konkret dijelaskan dalam buku Partisipasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Depdiknas , bahwa bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Pengawasan terhadap anak-anak.
- b. Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki sarana-prasarana baik secara individu maupun gotongroyong.
- c. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan bea siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan sebagainya.

.

³⁶ Siti Irene, A. D., *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011) 58.

³⁷Widi Astuti, Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Se Kecamatan Godean, Skripsi, (Yogyakarta: FIP UNY, 2008) 14.

d. Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anak-anak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.³⁸

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

- a. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli
- d. Pengadaan dana dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku)
- e. Pengadaan kesempatan untuk magang
- f. Pengadan dana dan pemberian lainnya
- g. Pemberian bantuan manajemen
- h. Pemberian pemikiran dan pertimbangan
- i. Pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.³⁹

Sedangkan menurut Made Pidarta, bidang partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:

- a. Alat-alat belajar
- b. Kurikulum terutama yang lokal
- c. Dana
- d. Material untuk bangunan

³⁸Depdiknas, *Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2001).

³⁹ Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 88.

- e. Auditing keuangan
- f. Control terhadap kegiatan-kegiatan sekolah⁴⁰

Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian dan moril.Partisipasi dalambentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan, pinjaman,beasiswa, dll. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan buku pelajaran, pengadaan dan bantuan ruangan, gedung, tanah dan lain sebagainya. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut serta dalam program pendidikan memperbaiki sarana-prasarana, dll. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan dan atau dalam penyelenggaraan pengembangan pembelajaran.

4. Manfaat Partisipasi

Menurut Pariatra Westra manfaat partisipasi adalah:

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.

-

 $^{^{\}rm 40}$ Made Pidarta, $Manajemen\ Pendidikan\ Indonesia,$ (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 188.

e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Burt K. Schalan dan Roger bahwa manfaat dari partisipasi adalah:

- a. Lebih banyak komunikasi dua arah.
- b. Lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan.
- c. Manajer dan partisipasi kurang bersikap agresif.
- d. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, diakui dalam derajat lebih tinggi.⁴¹

Dari pendapat-pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu:

- a. lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- b. Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
- c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.
- d. Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama.
- e. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

⁴¹Widi Astuti, *Partisipasi Komite Sekolah*, 14.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi seseorang yang tercermin dalam perilaku dan aktifitasnya dalam suatu kegiatan. Faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi antara lain pendidikan, penghasilan dan pekerjaan anggota masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Tingkat pendidikan orang tua siswa memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasinya dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Faktor lain disampaikan oleh Angell dalam Ensiklopedia Wikipedia berjudul Partisipasi mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal.⁴²

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa

1

⁴²Muslikh Bahaddur, Partisipasi Orang Tua, 23-24.

dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

C. Hubungan Antara Akuntabilitas Keuangan Sekolah Dengan Partisipasi Wali Murid

Akuntabilitas didalam menejemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparasi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 43

Pengelolaan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak di-harapkan. Partisipasi sangat berguna bagi sekolah di dalam memvalidasi premis darimana sebuah program berasal, maka dari itu akan berkontribusi terhadap efektivitas program.

⁴³Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan* .., 8.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila akuntabilitas benar maka partisipasi masayarakat terhadap sekolah akan tinggi, karena masyarakat mempercayai sekolah.

D. Hipotesis

Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata "*hypo*" yang artinya di bawah dan "*thesa*" yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis.⁴⁴

Menurut A. Hamid Syarif, hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.

Sedangkan Sutrisno Hadi, hipotesa statistik adalah suatu dugaan yang merupakan suatu pernyataan tentang keadaan parameter yang didasarkan atas probabilitas distribusi sampling dari parameter itu.⁴⁵

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*k, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 316.

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data yang perlu dibuktikan kebenarannya ⁴⁶.

Menurut penelitian yang berjudul analisis kausalitas antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan terhadap partisipasi orang tua murid bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi wali murid. Sedangkan penelitian yan dilakukan oleh Denny Boy dan Hotniar Siringoringo menyatakan bahwa pengaruh akuntabilitas lebih kuat daripada transparansi, dan orang tua murid lebih mengutamakan akuntabilitas daripada transparansi. Semakin transparan dan akuntabel pengelolaan pendidikan yang dilakukan, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat.

Apabila akuntabilitas benar maka partisipasi masayarakat terhadap sekolah akan tinggi, karena masyarakat mempercayai sekolah. Sesuai teori partisipasi yang ada, partisipasi yang peneliti ambil terdiri dari 4 hal, yaitu: sumbangan finansial, sumbangan kekuatan fisik, sumbangan material dan memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).⁴⁷

Dengan demikian maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

 Hipotesis Kerja (Ha) atau disebut hipotesis alternatif yang menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.⁴⁸
 Dalam penelitian ini hipotesis kerja (Ha1) adalah adanya hubungan akuntabilitas

.

⁴⁶ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 96.

⁴⁷Ibid 19

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian..*, 112.

keuangan sekolah dengan partisipasi wali murid di SDN Sekarputih Bagor Nganjuk. Dan hipotesis kerja (Ha2) adalah ada pengaruh positif akuntabilitas keuangan sekolah terhadap partisipasi wali murid.

2. Hipotesis Nihil (Ho) atau Hipotesis yang sering juga disebut hipotesis statistik, karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya hubungan variabel X terhadap variabel Y. 49 Dalam penelitian ini hipotesis nihil (Ho1) adalah tidak ada hubungan akuntabilitas keuangan sekolah dengan partisipasi wali murid di SDN Sekarputih Bagor Nganjuk. Dan hipotesis nihil 2 (Ho2) tidak ada pengaruh antara akuntabilitas keuangan sekolah terhadap partisipasi wali murid.

⁴⁹Ibid., 113.